

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adisasmita, Rahardjo, 2006, *Buku Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu).

Ashofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta).

Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Gaffar Karim, Abdul, 2003, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Hakim, Lukman, 2016, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, (Jakarta: Setara Press).

Mardiasmo, 2016, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi).

Muliadi, Ahmad, 2010, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Akademia).

Mulya Firdausy, Carunia, 2018, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia).

Pahala Siahaan, Marihot, 2016, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo).

Phaureula Artha Wulandari dan Emi Iryanie, 2017, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, (Yogyakarta: Deepublish).

Safi'i, M., 2007, *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Perspektif Teoritik*, (Malang: Averroes Press).

Soemantri, Sri, 2016, *Otonomi Daerah*, (Bandung: Rosdakarya).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada).

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada).

Susanto, Hery, 2003, *Otonomi Daerah dan Kompetensi Lokal*, (Jakarta: Millenium Publisher).

Internet:

<http://bkud.semarangkab.go.id/>, diakses pada tanggal 19 September pukul 15:00 WIB.

<https://semarangkab.bps.go.id/statictable>, diakses pada tanggal 19 September 2020 pukul 14:45 WIB.

<https://simanggaran.semarangkota.go.id/>, diakses pada tanggal 19 September 2020 pukul 16:10 WIB.

Jurnal:

Kantor UPPD dan Samsat Kabupaten Semarang, 2019, *Jurnal UPPD dan Samsat Kabupaten Semarang*, (Nomor 1, Volume 2).

Niken Aroem Ardhani, 2017, *Kajian Tentang Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah*, (Nomor 1, Vol 1).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kembali Unit Pelayanan Publik.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah Kabupaten Semarang.

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah Kabupaten Semarang.

Wawancara

Niken Aroem Ardhani, *Wawancara*, UPPD Kab. Semarang, (Kab. Semarang, 2 Oktober 2020).